

Daftar Isi

1. PERSYARATAN KEBUDAYAAN DISERUKAN (*Media Online Kompas*)

Pernyataan Kebudayaan Diserukan

Sejumlah Lembaga Dukung Kementerian Kebudayaan

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga dan komunitas kebudayaan menyusun dan menyerukan sebuah Pernyataan Kebudayaan yang dibacakan di Galeri Cemara, Jakarta, Minggu (7/9). Mereka mendesak RUU Kebudayaan bisa disahkan dan kementerian kebudayaan dibentuk.

Lembaga itu di antaranya Lingkar Budaya Indonesia, Asosiasi Museum Indonesia, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Komunitas Historia Indonesia, Jaringan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Beberapa pemerhati dan pelaku kebudayaan yang hadir di antaranya Mooryati Soedibyo, Herawati Diah, Mimis Katto, Lulu Soemarso, Toeti Heraty, Nunus Supardi, dan Putu Supadma Rudana.

Pernyataan Kebudayaan itu didesakkan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut mereka,

setelah 69 tahun Indonesia merdeka, saatnya kebudayaan mendapatkan pengukuhan untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam berperan membangun bangsa.

Untuk mewujudkannya, bidang kebudayaan harus mendapatkan prioritas dalam kementerian yang mandiri. Untuk mewujudkan amanat UUD 45, diperlukan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman budaya, peran, posisi, dan pengurusan bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Banyak pertimbangan mengenai pentingnya kementerian kebudayaan. Posisi kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak hanya dilihat sebagai produk, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan. Sesuai amanat Pembukaan UUD 45 dan Pasal 32 UUD 45, kebudayaan memiliki peran penting dalam proses membangun karakter bangsa, persatuan, dan kesatuan. Kebudayaan juga memperkuat jati diri, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan cinta Tanah Air. Kebudayaan juga mampu mengubah pola pikir (revolusi mental) serta membangun citra bangsa di dunia internasional.

Nunus, selaku ketua tim penyusun deklarasi, mengatakan, nasib kebudayaan selama ini selalu terpinggirkan di dalam pengurusan pemerintahan. "Kebudayaan disubordinasi, dicampur-campur dengan kementerian lain dan selalu mendapatkan

anggaran paling kecil," tutur Nunus.

Mooryati Soedibyo mengatakan, ia pun selama ini selalu memikirkan mengapa kebudayaan di bawah digabungkan dengan pariwisata dan pendidikan, tidak mandiri. Ia mendukung adanya kementerian kebudayaan karena Indonesia dengan suku bangsa terbesar sedunia harus diwadahi.

Herawati Diah menekankan pernyataan Mohamad Hatta pada Kongres Kebudayaan 1948, yaitu, "Pemerintahan suatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa." "Langkah yang tepat untuk membentuk kementerian kebudayaan," kata Herawati, melalui juru bicaranya. (IVV)

Sejumlah lembaga dan komunitas kebudayaan menyusun dan menyerukan sebuah pernyataan kebudayaan yang dibacakan di galeri cemara untuk mendesak RUU Kebudayaan bisa disahkan dan kementerian Kebudayaan dibentuk

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #StrukturKabinet #RKP(RencanaKegiatanPemerintah)